PUPR BPPW NTB
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

KOTA MATARAM

PROGRAM KOTAKU | KOTA TANPA KUMUH

NEWSLETTER

EDISI IV TRIWULAN III TAHUN 2021

KEKHASAN DALAM PROGRAM KOTAKU-DFAT MEWUJUDKAN PENGAPLIKASIAN GESI DAN UNIVERSAL AKSES

INDEX BERITA :

Hal. 2 : Program Kotaku-DFAT Mulai Berproses, Melangkah menggapai Progres

Hal. 3 : PPKM Berlaku, Program KOTAKU-DFAT di NTB Tetap Melaju

Hal. 4 : Sinkronisasi Rencana Kerja Pokja PKP dan Forum PKP Mataram

Hal. 5 : Kadis Perkim dan Forum PKP Kompak Meninjau Lokasi DFAT Sekaligus Skala Kawasan

Hal. 6 : HWDI Provinsi NTB Mengetuk Pintu Mengaspirasi GESI dalam Program KOTAKU-DFAT

Hal. 7 : KSM Lokasi DFAT Dilatih Pelaksanaan Kegiatan Diharapkan Lebih

Hal. 8 : Pengamanan Dampak Dalam Pelaksanaan Kegiatan Adalah Suatu Keniscayaan

Hal. 9 : Sinergitas Program Yang Menjadi Misi Kunjungan Direktur PKP Ke Kota Mataram

Tim Redaksi : Tim Korkot Cluster 1 Kota Mataram
Alamat : Jl. Danau Maninjau I No. 12 Griya Pagutan Permai - Mataram

ALBUM FOTO
SERTIFIKASI KEGIATAN CFW KOTA MATARAM TA. 2021

EDITORIAL

Edisi Keempat Triwulan Ke-III (Juli-Agustus-September) Newsletter Kotaku Mataram ini akan menyajikan tahapan dan progres pelaksanaan Kegiatan Kotaku-DFAT dengan Tema kali ini "Kekhasan dalam Program Kotaku-DFAT, Mewujudkan Pengaplikasian GESI dan Universal Akses". Newsletter ini menjadi media sosialisasi dan komunikasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Mataram yang tentunya diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh tentang pelaksanaan Program Kotaku baik di tingkat pelaku dan terlebih bagi Pemda. Tentunya banyak kekurangan dalam penyajiannya, maka saran, masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar ke depannya lebih baik lagi.

Kotaku_Mataram | Kotaku-Mataram | Kotaku Mataram | Kotaku.korkotmataram@gmail.com

Program Kotaku-DFAT Mulai Berproses, Melangkah menggapai Progres

KOTAKU-DFAT merupakan bagian dari Program KOTAKU yang mendapat dukungan pembiayaan dari Hibah *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT). Hibah DFAT merupakan salah satu bentuk kolaborasi pada program KOTAKU dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan. Kegiatan infrastruktur DFAT dilaksanakan pada lokasi percontohan berdasarkan tipologi permukiman kumuh seperti di tepi air, di atas air, di perbukitan, di dataran rendah dan di daerah rawan bencana (Permen PUPR No. 14 Tahun 2018), khususnya infrastruktur akses air minum dan sanitasi untuk memenuhi target minimal layanan 80 persen di lokasi kumuh yang sudah ditangani. Sejalan dengan kebijakan Presiden dan Menteri PUPR, maka program hibah DFAT difokuskan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024 memiliki target untuk penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang memenuhi target minimal layanan 80% serta menjadi salah satu instrument bantuan pemerintah kepada masyarakat untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi akibat dampak covid.19, melalui pelaksanaan kegiatan dengan Pola Padat Karya dalam perbaikan dan/atau pembangunan infrastruktur permukiman.

Kota Mataram yang menjadi salah satu Kota percontohan lokasi DFAT telah mulai melaksanakan proses pendampingan di tingkat masyarakat. Disamping dengan sosialisasi, FGD maupun survey lokasi, salah satu tahapan yang saat ini tengah dilaksanakan adalah pembentukan/penguatan TIPP di masing-masing Kelurahan lokasi DFAT. Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/KPTS/M/2021, tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Bebasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021, bahwa Kelurahan yang menjadi lokasi DFAT di Kota Mataram adalah Kelurahan Kebon Sari Kecamatan Ampenan, Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Babakan dan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya. Hingga saat ini semua Kelurahan telah melaksanakan sosialisasi Program DFAT di tingkat Kelurahan maupun pembentukan atau revitalisasi TIPP. Pembentukan atau revitalisasi TIPP bertujuan untuk menyiapkan tim perencana partisipatif di tingkat Kelurahan dalam rangka menggali permasalahan kumuh dan potensi yang dimiliki untuk menjawab kebutuhan *Watsan* (*Water and Sanitation*) yang belum terpenuhi. Pelibatan TIPP dalam mendesain konsep penanganan kumuh kawasan agar masyarakat pada umumnya dapat menemukenali permasalahan kumuh yang dihadapi serta ide konsep penanganannya. Hal ini tak terlepas dari maksud pelaksanaan program DFAT yaitu :

1. Program KOTAKU-DFAT adalah untuk mendukung Program KOTAKU dalam pengembangan inovasi penanganan permukiman kumuh perkotaan.
2. Program ini mendukung pula pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akibat dampak wabah COVID-19 melalui pola padat karya dalam perbaikan dan/atau pembangunan infrastruktur permukiman.
3. Program KOTAKU-DFAT dilakukan dengan fasilitasi lokasi percontohan/pilot yang harapannya kemudian menjadi model pembelajaran untuk diadopsi, diadaptasi, dan direplikasi oleh pemerintah daerah di lokasi lainnya.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Maupun Tujuan dari pelaksanaan program DFAT yaitu “Mewujudkan permukiman perkotaan layak huni, inklusif, produktif, berketahanan, dan berkelanjutan”.

Dalam rangka tercapainya maksud dan tujuan program DFAT, maka perlu dilakukan strategi pelaksanaan seprti di bawah ini :

1. Mengembangkan inovasi penanganan permukiman kumuh yang inklusif dengan menerapkan aksesibilitas universal, berketahanan terhadap bencana (termasuk wabah);
2. Meningkatkan dukungan pencapaian akses terhadap infrastruktur dan pelayanan sarana air minum dan sanitasi di lokasi sasaran dalam memenuhi target pelayanan minimal 80%; terbangunnya infrastruktur yang ramah disabilitas dan ramah lingkungan; inovasi alternatif penanganan keamanan bermukim; serta meningkatkan kualitas permukiman di lokasi kumuh Program KOTAKU;
3. Meningkatkan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 melalui pelaksanaan kegiatan dengan Cash for Works serta Pola Padat Karya;
4. Mendorong kolaborasi dengan para pihak dalam peningkatan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi

Strategi pelaksanaan yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari keluaran *(output)* yan ingin dicapai, yaitu :

1. Adanya kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan KOTAKU-DFAT.
2. Tersusunnya penajaman dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang sudah melalui uji publik dan berbagai instrumen/dokumen turunannya.
3. Tersusun penajaman dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).
4. Terlaksananya pembangunan fisik dan peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan KOTAKU-DFAT
5. Adanya kontribusi pada berkurangnya luasan kumuh melalui percontohan tematik penataan lingkungan permukiman yang inovatif

Dalam proses sosialisasi maupun pembentukan atau revitalisasi TIPP yang telah dilakukan di 5 Kelurahan lokasi DFAT, baik itu maksud dan tujuan Program DFAT, Strategi pelaksanaan, keluaran dari program, Kriteria Kelurahan lokasi DFAT, mekanisme dan teknis pelaksanaan telah disampaikan kepada warga yang mengikuti proses sosialisasi maupun pembentukan atau revitalisasi TIPP. Hal ini penting agar tahapan selanjutnya dalam menyiapkan konsep maupun rencana penanganan, baik itu BKM, TIPP maupun warga masyarakat di lokasi kegiatan dapat memahami dan menjalankan seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan capaian dari progress kegiatan yang ingin dicapai.

PPKM Berlaku, Program KOTAKU-DFAT di NTB Tetap Melaju

Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi salah satu Kota percontohan lokasi DFAT telah memulai pelaksanakan proses pembangunan infrastruktur meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 dan pemberlakukan PPKM darurat. Mengawali pelaksanaan kegiatan, telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan MCK di Lingkungan Karang Rundun Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya yang dilaksanakan oleh KSM Cendana BKM Karya Bhakti pada hari Kamis (22/07/2021). Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Sandubaya Henny Suyasih didampingi oleh staf Kelurahan, BKM dan KSM, Tim OSP-5 NTB dan tim fasilitator pendamping. Henny Suyasih yang merupakan Camat perempuan pertama di Kota Mataram ini mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, sangat antusias dengan program yang merupakan inisiasi dari Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya melalui Program Kotaku-DFAT dengan pendekatan padat karya nya. Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat menyerap tenaga kerja dari warga sekitar Kelurahan Bertais, terutama yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Dari 11 KSM yang terbentuk di 5 Kelurahan lokasi DFAT seluruhnya telah melakukan pemindahbukuan dari rekening BKM ke rekening KSM, sehingga secara serempak semua KSM telah dapat memulai kegiatan berdasarkan rencana kerja KSM yang telah disepakati. Di samping KSM Cendana Kelurahan Bertais, di Kelurahan lainnya juga telah memulai pelaksanaan pekerjaan fisiknya, seperti KSM Swakarsa dan KSM Kaliber Kelurahan Kekalik Jaya pun telah memulai kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan mematuhi arahan dari Satgas Covid Kelurahan. Begitu juga dengan Kelurahan lainnya telah memulai kegiatan dengan diawali pembongkaran dan pembersihan lahan lokasi pekerjaan.

Dalam pemantauannya Team Leader OSP-5 NTB Nurhadi menyerukan kepada seluruh pelaku kegiatan baik di tingkat Kelurahan maupun fasilitator pendamping agar senantiasa tetap menjaga kesehatan, mematuhi arahan pemerintah terkait PPKM darurat dan dalam setiap pendampingan senantiasa memperhatikan prokes 5M sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19, karena saat ini Kota Mataram telah masuk zona merah peningkatan terjadinya kasus penularan Covid-19.

" tujuan kita baik, proses yang baik, inshaallah hasilnya akan baik, kami berharap agar tim di lapangan tetap jaga kesehatan, jaga semangat, mari sama-sama kita pastikan seluruh proses terkawal dengan baik, yakinlah Allah akan selalu memberi kemudahan dan keberkahan untuk kita semuanya " pesan yang disampaikan Nurhadi.

Melihat apa yang telah dilaksanakan, Nurhadi optimis pelaksanaan kegiatan Kotaku-DFAT ini bisa terlaksana dengan baik, berjalan lancar dan apa yang menjadi tujuan dari program Kotaku-DFAT ini yaitu mewujudkan permukiman perkotaan layak huni, inklusif, produktif, berketahanan, dan berkelanjutan dapat terwujud dengan dukungan seluruh pihak. Masa pelaksanaan yang hanya sekitar 4 bulan efektif tidak menyurutkan semangat Tim DFAT untuk memaksimalkan waktu dan strategi pelaksanaan yang dilakukan. Hal ini terungkap oleh apa disampaikan Senior Fasilitator Tim DFAT Rini Friani yang dalam kesempatan terpisah menyakini bahwa tahapan dan proses yang dilakukan cukup panjang, pelaku kegiatan sudah sangat siap dan sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang tertuang dalam kontrak BKM dengan PPK Satker PKP Balai PPW Provinsi NTB. Tim fasilitator selalu berupaya memberikan penguatan dan pendampingan ekstra. "Saat ini kami sudah tidak lagi mengenal hari libur, hanya dengan kerja keras dan semangat membuncak dari semua tim dan pelaksana kegiatan yang dapat mengantarkan program ini tuntas di penghujung tahun " timpal Rini Friani.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Semoga dengan pancaran semangat itu dapat mengalahkan kekhawatiran dan keresahan pendamping dalam melaksanakan kegiatan Kotaku-DFAT di tengah berlangsungnya PPKM di seluruh lokasi kegiatan

Sinkronisasi Rencana Kerja Pokja PKP dan Forum PKP Mataram

Hari ini, Rabu (07/07/2021) bertempat di aula rapat Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Mataram telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan program kegiatan Pokja PKP dan Forum PKP Kota Mataram. Kegiatan ini diinisiasi oleh Ketua Pokja PKP Lalu Agus Supriyadi dengan dihadiri oleh perwakilan anggota Pokja, Ketua Forum PKP Abd. Rahman, wakil ketua dan sekretaris Forum PKP, Sekretaris Dinas Perkim, perwakilan dari BPPW NTB, dan tim Kotaku Mataram. Adapun agenda pertemuan pada hari ini adalah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sebelumnya agar terjadi sinkronisasi rencana kerja Pokja PKP dengan Forum PKP. Dari rencana kerja yang pernah disusun oleh Pokja PKP dan Forum PKP, pimpinan pertemuan Lalu Agus Supriyadi menekankan kembali tugas dan fungsi Pokja PKP dan Forum PKP yaitu melakukan mediasi kebutuhan program masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dimulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi kegiatan. Tak lupa Lalu Agus Supriyadi mengingatkan pentingnya sumber data yang akurat dan *up to date* dalam bentuk *big data* terpadu. "program apapun yang akan dilaksanakan, tanpa adanya *big data* terpadu yang ter *update*, tak mungkin kita bisa mengusulkan dan mengajukannya, baik di tingkat Pemda lebih-lebih program dari pusat, maka hal pertama yang menjadi perhatian bagi Pokja PKP dan Forum PKP adalah menyiapkan *big data* terpadu tersebut dan kami berkomitmen akan menyiapkannya hingga akhir tahun 2021 ini" pungkasnya. Disamping itu kebutuhan data backlog perumahan yang sampai saat ini belum dilakukan pendataan terpadu juga akan menjadi perhatian khusus dari Pokja PKP maupun Forum PKP untuk dilaksanakan melalui rencana kerjanya. Di kesempatan lain Ketua Forum PKP, Abd. Rahman yang juga merupakan ketua Komisi III DPRD Kota Mataram mengharapkan rencana kerja yang telah disusun bersama dapat dijadikan sebagai kerangka kerja oleh Pokja PKP maupun Forum PKP. Hal mendasar yang disampaikan oleh Abd. Rahman adalah bahwa kebutuhan akan big data menjadi keniscayaan dan disinilah peran dari Forum PKP untuk menyiapkannya. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Pokja PKP, bahwa target akhir tahun 2021 adalah menyiapkan dan menyajikan data terpadu yang bisa diakses siapa pun dalam rangka menjalankan program khususnya perumahan dan kawasan permukiman. Tak lupa Abd. Rahman juga menyinggung rencana kerja Pokja PKP dan Forum PKP yang telah disusun agar dapat ditindaklanjuti. "Rencana yang paling dekat adalah melakukan peninjauan lokasi DAK Terintegrasi yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Mataram, memastikan komunikasi dengan pemilik lahan yang ditinggali oleh warga secara ilegal di Kelurahan Bintaro agar sesegera mungkin *clean and clear*, menyelenggarakan rapat rutin di sekretariat Forum PKP yang sedang disiapkan dan menyiapkan program selanjutnya yang tertuang dalam rencana kerja, itu fokus utama Forum PKP saat ini" timpal Abd. Rahman.

Diskusi dalam pertemuan tersebut berlangsung hangat, banyak informasi dan masukan yang dituangkan dalam rekomendasi hasil rapat koordinasi. Dari Korkot Kotaku Hartatik mendorong agar Pokja PKP dan Forum PKP segera melakukan pendataan warga terdampak di lokasi kegiatan DAK Terintegrasi, menjalin komunikasi dengan pemilik lahan dan Pokja PKP segera menyusun jadwal peninjauan lokasi. Tanggapan dari perwakilan BPPW NTB disampaikan oleh Heru Wahyono yang mengapresiasi begitu aktifnya Pokja PKP dan Forum PKP Mataram setelah terbentuk, dengan didukung oleh Rencana Kerja yang telah disusun, maka BPPW NTB mendukung dan tetap melakukan pendampingan dalam menjalankan rencana kerja Pokja dan Forum PKP. Tentunya peran aktif dan keberfungisan Pokja PKP dan Forum PKP Kota Mataram juga sangat menentukan untuk bisa terlaksananya program yang telah disiapkan. Disamping itu, BPPW NTB juga akan berkoordinasi dengan Pokja PKP untuk menyusun jadwal rencana kunjungan lapang untuk meninjau rencana lokasi untuk pembangunan Rusunawa Kawasan, baik itu di Monjok (Kawasan Pasca Bencana), Dasan Agung (Kawasan DAS Jangkok) maupun Kawasan Pesisir Bintaro menjadi kawasan terpadu penataan kawasan kumuh disamping program DAK Terintegrasi.

Dari hasil diskusi dan pembahasan secara menyeluruh, dapat ditarik rekomendasi pertemuan ini, yaitu :

1. Penyiapan program pendataan *big data* terpadu, mulai dari pendataan perumahan dan permukiman di lokasi DAK Terintegrasi maupun kawasan lainnya, ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2021.
2. Melakukan penjadwalan ulang untuk melakukan komunikasi intens dengan pemilik lahan yang saat ini ditinggali oleh warga di lokasi rencana kegiatan DAK Terintegrasi dengan melibatkan pihak kecamatan, kelurahan dan aparat lingkungan setempat.
3. Menyusun dan menyiapkan jadwal rencana kunjungan lapang ke lokasi Kawasan DAK Terintegrasi untuk memastikan konsep perencanaan dan memastikan data warga terdampak di seputar lokasi rencana kegiatan.
4. Menyusun jadwal rencana kunjungan lapang untuk meninjau rencana lokasi untuk pembangunan Rusunawa Kawasan, baik itu di Monjok (Kawasan Pasca Bencana), Dasan Agung (Kawasan DAS Jangkok) maupun kegiatan Kotaku yang akan dilaksanakan pada tahun ini, yaitu kegiatan skala kawasan pasca bencana dan kegiatan hibah DFAT melalui program Kotaku.
5. Memaksimalkan fungsi kesekretariatan Forum PKP serta mengusulkan tenaga ahli yang diperbantukan untuk menjalankan fungsi perencanaan dan pengolahan manajemen data di sekretariat Forum PKP.

Kadis Perkim dan Forum PKP Kompak Meninjau Lokasi DFAT Sekaligus Skala Kawasan

Kota Mataram menjadi salah satu kota prioritas dalam rangka pelaksanaan program penanganan kawasan permukiman kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Tahun ini saja, selain telah dilaksanakannya kegiatan *Cash For Work (CFW)* Kotaku di 16 Kelurahan dengan pagu dana 300 juta per kelurahan pada periode April hingga Juni lalu, saat ini tengah dilaksanakan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui program Kotaku-DFAT. Program KOTAKU-DFAT merupakan bantuan hibah negara Australia melalui *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) yang merupakan kolaborasi dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan. Sejalan dengan kebijakan Presiden dan Menteri PUPR, maka program hibah DFAT difokuskan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024 memiliki target untuk penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang memenuhi target minimal layanan 80% serta menjadi salah satu instrumen bantuan pemerintah kepada masyarakat untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi akibat dampak covid-19, melalui pelaksanaan kegiatan dengan Pola Padat Karya dalam bentuk kegiiatan perbaikan dan/atau pembangunan infrastruktur permukiman. Dengan pagu dana 2 miliar per kelurahan untuk 5 lokasi kelurahan yang mendapatkan Program Kotaku-DFAT, diharapkan dapat mengurangi luasan kumuh Kota Mataram dan terbangunnya kolaborasi dalam menuntaskan permasalahan permukiman kumuh

Dalam rangka melihat dari dekat proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui Program Kotaku-DFAT di Kelurahan Bertais, hari ini Kamis (12/08/2021) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram M. Nazaruddin Fikri, bersama Ketua Forum PKP yang juga merupakan Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Abd. Rahman, serta unsur Pokja PKP didampingi Korkot Kotaku Mataram Hartatik, melakukan monitoring pembangunan MCK maupun jalan lingkungan paving block universal akses ke Lingkungan Karang Rundun, Gontoran Barat dan Pengempel Indah Kelurahan Bertais. Lokasi ini dipilih karena di sana juga merupakan lokasi rencana kegiatan Program Kotaku skala kawasan dengan tajuk skala kawasan pasca bencana. "Jadi kita turun monitoring ke lokasi ini untuk melihat capaian pelaksanaan program Kotaku, sekaligus meninjau lokasi rencana pelaksanaan kegiatan skala kawasan yang telah lama direncanakan oleh Pemerintah Kota Mataram" ungkap M. Nazaruddin Fikri. Setelah melihat lokasi rencana jalan penghubung yang akan menghubungkan Kelurahan Bertais dengan Kelurahan Selagalas melalui program Kotakuk skala kawasan yang berada di Lingkungan Gontoran Barat, rombongan selanjutnya menuju Lingkungan Pengempel Indah. Melihat begitu banyak program yang masuk ke Kelurahan Bertais, dalam kesempatan terpisah Ketua Forum PKP antusias penanganan permukiman kumuh khususnya di Kelurahan Bertais dapat segera dituntaskan. "Tentunya kami melalui Forum PKP akan menjembatani program dari pemerintah dengan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas di tingkat masyarakat" pungkasnya.

Menata permukiman yang pernah luluh lantah karena bencana alam gempa bumi tahun 2018 lalu bukanlah perkara mudah, walaupun perumahan warga yang roboh pasca gempa telah terbangun, namun sarana prasarana permukimannya masih banyak menyisakan kerusakan dan perlu penataan menyeluruh agar kawasan pasca bencana ini menjadi permukiman yang tertata rapid an tangguh bencana. Nazarudin Fikri banyak memberikan masukan kepada tim Kotaku yang mendapingi dalam kegiatan monitoring tersebut, bukan hanya bagaimana menyiapkan masyarakatnya namun memastikan pembangunan yang dilakukan dapat menuntaskan seluruh permasalahan permukiman kumuh baru akibat bencana gempa. Disamping itu Ketua Forum PKP Abd. Rahman yang juga merupakan Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram akan berupaya melalui rencana kerja yang telah disusunnya mengupayakan kolaborasi program maupun pendanaan agar wajah Kelurahan Bertais yang merupakan gerbang pintu masuk Kota Mataram menjadi lebih baik, lebih asri dan menjadi ikon taman batas kota dengan Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Mataram.

HWDI Provinsi NTB Mengetuk Pintu Mengaspirasi GESI dalam Program KOTAKU-DFAT

Infrastruktur berperan penting dalam memastikan akses dan inklusi spasial yaitu akses terhadap tanah, rumah, dan layanan publik, inklusi sosial yaitu akses bagi individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat maupun inklusi ekonomi akses kesempatan kerja, pendidikan, sumber pembiayaan dalam lingkungan kota. Mewujudkan kota yang inklusif (kota yang menghargai seluruh warganya, beserta kebutuhan mereka dengan setara) adalah merupakan tujuan pembangunan infrastruktur yang responsif. Begitu pula dengan GESI (*Gender Equality and Social Inclusion*) yang mencakup kesetaraan gender dan inklusi sosial yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Salah satu upaya mewujudkannya adalah melalui pelaksanaan Program Kotaku-DFAT yang mendapat dukungan pembiayaan dari Hibah *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT). Dalam rangka mengaplikasikan GESI maupun *infrastruktur for all*, hari ini Sabtu (31/07/2021) Tim Kotaku Mataram mengundang Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi NTB berkunjung dan melihat dari dekat proses pembangunan MCK yang aksesibiltas universal di Lingkungan Karang Rundun Kelurahan Bertais dan Lingkungan Kebon Bawan Nurul Yaqin Kelurahan Kebon Sari. Dalam kunjungannya, ketua HWDI NTB Sri Sukarni didampingi tim memberikan tanggapan dan aspirasinya terkait pembangunan MCK yang sedang dilaksanakan oleh KSM. "kami tidak bermaksud menggurui, namun seyogyanya MCK yang dibangun betul-betul memperhatikan akses dan kebutuhan disabilitas, disamping itu bisa digunakan oleh anak, orang tua/lansia dan ibu hamil atau orang yang sedang dalam kondisi sakit" timpalnya.

Ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan agar MCK bisa dikatakan aksesibiltas universal dan mengedepankan GESI. Dari proses diskusi bersama BKM, KSM, Tim fasilitator dengan HWDI NTB, berikut ini kesimpulan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti :

1. Ukuran bangunan MCK sesuai standar minimal 1,8 meter x 1,8 meter dengan memperhitungkan luas manuver kursi roda dalam ruangan/bilik kamar mandi dengan lebar pintu minimal 90 cm.
2. Jika memungkinkan ada lahan untuk panjang dan lebar bangunan MCK tidak prototype (dapat menggunakan ukuran 1,5 meter x 1,7 meter atau memodifikasinya dengan ukuran 1,5 meter x 2,0 meter).
3. Jika keterbatasan lahan untuk bangunan MCK hanya tersedia 1,5 meter x 1,5 meter maka perlu disiapkan teras di depan bangunan MCK sebagai tempat manuver pengguna kursi roda dengan ukuran minimal 1,5 meter x 1,5 meter dan meambahkan ram
4. Untuk Ram dengan perbandingan 1:12 (standar permen) atau toleranai 1:10
5. Hand railing Ram merupakan salah satu syarat keamanan pengguna disabilitas dan itu juga dapat dimanfaatkan untuk difabel lainnya, jika hand railing tidak memungkinkan dengan lahan yang terbatas, minimal ada bantalan di Ram.
6. Disarankan untuk Ram menggunakan batu sikat agar tidak licin.
7. Jalan menuju MCK dipastikan bisa diakses oleh disabilitas, terutama bagi tuna rungu wicara perlu ditambahkan rambu penunjuk arah lokasi MCK.
8. Tinggi pemasangan hand railing standarnya 60 cm begitu juga tinggi kran air 60 cm dari lantai.
9. Pintu MCK sebaiknya menggunakan pintu geser sehingga dapat digunakan oleh disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik.
10. Menggunakan closed duduk sehingga mudah digunakan oleh pengguna kursi roda dan disabilitas lainnya.
11. Posisi closed sebaiknya tidak sejajar atau segaris dengan posisi pintu agar tidak mengurangi ruang manuver bagi pengguna kursi roda.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Tak lupa Ketua HWDI NTB menitipkan pesan agar seluruh peserta yang hadir dalam diskusi tersebut diminta untuk mengunjungi tempat mereka di Balai Sosial Bina Remaja (BSBR) Bengkel Kabupaten Lombok Barat, agar dapat melihat dari dekat seperti apa kondisi para penyandang disabilitas dengan berbagai difabel yang memiliki keterbatasan secara fisik. Sri Sukarni berharap agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Program Kotaku-DFAT dapat memenuhi azas 4 K yaitu, Keamanan, Kenyamanan, Kebermanfaatan dan Kemandirian, sehingga penerapan GESI dan *Infrastruktur for All* dapat terwujud sesuai harapan program.

KSM Lokasi DFAT Dilatih Pelaksanaan Kegiatan Diharapkan Lebih

Terlaksananya kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Program Kotaku-DFAT tidak terlepas dari peran KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang mumpuni dan memiliki kepedulian yang tinggi untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan keswadayaan bersama masyarakat di lokasi kegiatan. Kekhasan yang menjadi tuntutan dalam Program Kotaku-DFAT menjadi keniscayaan bagi pelaku kegiatan di tingkat Kelurahan, terutama KSM betul-betul telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup terkait konsep, desain teknis dan penerapannya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mangarusutamakan *GESI (Gender Equality and Social Inclusion)* hingga terpenuhinya universal akses. Untuk mewujudkan KSM yang mumpuni, maka OSP-5 Provinsi NTB mengadakan kegiatan Pelatihan KSM bagi lokasi DFAT secara cluster. Hal ini dilakukan untuk membatasi jumlah peserta dalam ruangan karena kondisi masih dalam pandemic Covid-19 dan agar proses pelatihan berjalan efektif. Pelatihan KSM untuk cluster-1 (Kelurahan Bertais, Babakan dan Sayang-Sayang) dengan peserta yang terdiri dari 2 orang perwakilan BKM dan 8 orang perwakilan KSM masing-masing Kelurahan, dilaksanakan pada Selasa (7/9/2021), Rabu (8/9/2021) dan Kamis (16/9/2021). Sedangkan untuk cluster-2 (Kelurahan Kekalik Jaya dan Kebon Sari) dengan 10 peserta per kelurahan dilakansakan pada Rabu (8/9/2021), Kamis (9/9/2021) dan Kamis (16/9/2021). Panitia pelatihan merupakan kolaborasi dari tim OSP-5 NTB dengan Tim Korkot Kotaku Mataram dengan mengahdirkan narasumber dari internal maupun eksternal

Mengawali proses pelatihan KSM yang dilaksanakan di Lesehan Taliwang Nada Kota Mataram, turut hadir dan membuka kegiatan pelatihan ini Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri. Didampingi oleh Team Leader OSP-5 NTB dan Korkot Mataram, Kadis Perkim berpesan kepada peserta agar dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan sungguh-sungguh agar seluruh materi yang diberikan dapat dipahami dan diaplikasikan dalam pelaksanaan kegiatan. “KSM sebagai ujung tombak, maka harus diberi pemahaman yang lebih agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan program” pungkasnya. Dalam kesempatan lain, Team Leader OSP-5 NTB Nurhadi juga mengingatkan kepada peserta, bahwa kekhasan yang dimiliki dalam program Kotaku-DFAT harus dapat diimplementasikan menjadi infrastruktur yang universal akses. Momen pelatihan KSM ini diharapkan menjadi landasan dasar agar KSM dapat bekerja lebih baik dan taktis dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan SPPDL yang ditandatangani bersama BKM.

Selama 3 hari pelakanaan pelatihan, ada beberapa materi yang diberikan, mulai dari Pencegahan Covid-19 dalam Pelaksanaan Program Kotaku-DFAT yang disampaikan oleh Askot Bidang Safeguard Kotaku Mataram. Selanjutnya materi gambaran umum dan kekhasan dalam Program Kotaku-DFAT disampaikan oleh Team Leader OSP-5 NTB. Membangun Akuntabilitas Program Melalui Penyelenggaraan LPJ yang Baik dan Benar, materi ini khusus disampaikan oleh perwakilan BPKP Provinsi NTB. Kendali Mutu/Kualitas Pekerjaan Infastruktur Program Kotaku-DFAT, Persiapan Pelaksanaan Praktek Pencatatan Pembukuan dan Penyusunan LPJ dan nantinya di hari Kamis (16/9/2021) akan ditindaklanjuti dengan verifikasi hasil praktek, kendali waktu pemanfaatan BPM DFAT hingga penandatanganan komitmen KSM terkait kendali waktu pemanfaatan BPM DFAT. Tentunya output dari pelaksanaan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai mekanisme pelaksanaan program Kotaku-DFAT dan peserta mampu melaksanakan hal teknis dari seluruh materi yang diberikan oleh pemandu maupun narasumber. Besar harapan panitia dan pemandu agar peserta dapat menerima seluruh materi pelatihan yang diberikan, sehingga setelah dilatih, KSM dapat melaksanakan kegiatan dengan lebih, lebih baik, lebih memahami, lebih akuntabel, lebih berkualitas dan tentunya dapat berkelanjutan terhadap prasarana dan sarana yang terbangun, sehingga tujuan pelaksanaan program Kotaku-DFAT dapat terwujud dengan nyata.

Mengutip dari Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Safeguard Program Kotaku yang menyatakan bahwa potensi dampak lingkungan dan sosial kemungkinan terjadi dari penyelenggaraan pembangunan fisik infrastruktur tersier di kawasan kumuh, infrastruktur primer dan sekunder serta pembangunan infrastruktur pengembangan kawasan. Dilihat dari skala kegiatan, maka dampak yang mungkin ditimbulkan relatif kecil sampai sedang, bersifat lokal, dengan waktu relatif singkat dan tidak signifikan, dapat diperbaiki, atau belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar dampak yang ditimbulkan dapat diatasi dengan perencanaan teknik dan pelaksanaan manajemen konstruksi yang baik, akan tetapi beberapa kegiatan akan memerlukan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial. Maka dari itu upaya pengamanan dampak menjadi sebuah keniscayaan, namun apakah kita sudah mengaplikasikannya dalam setiap kegiatan pembangunan infrastruktur? Hal ini menjadi sebuah pertanyaan sejauh mana pelaku kegiatan telah melaksanakan petunjuk pelaksanaan safeguard dalam rangka pengamanan dampak tersebut. Mengamati upaya pengamanan dampak yang telah dilaksanakan dalam kegiatan skala lingkungan kegiatan padat karya *Cash For Work (CFW)* maupun kegiatan DFAT yang dilaksanakan di Kota Mataram Provinsi NTB, secara umum telah menjalankan safeguard sosial dan safeguard lingkungan dengan baik. Bagian dari safeguard sosial berupa dokumen legalitas lahan bagi kegiatan yang menggunakan lahan warga telah dilengkapi berupa surat izin pakai beserta lampirannya. Masa izin pakai penggunaan lahan untuk pembangunan infrastruktur untuk keperluan umum selama minimal 15 tahun diberikan oleh pemilik lahan, diketahui oleh ahli waris dan para saksi disampaikan kepada Lurah dengan lampiran foto kopi KTP pihak-pihak dan lampiran bukti kepemilikan tanah yang sah. Begitu juga penggunaan lahan milik pemerintah/lahan eksisting dengan membuat surat keterangan milik umum dengan dilampiri site plan lokasi pekerjaan. Sedangkan bagian dari safeguard lingkungan telah diawali dengan penyiapan dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang dibuat sesuai dengan jenis kegiatan di masing-masing Kelurahan dan diajukan ke Dinas LH untuk mendapatkan nomor register. Dokumen SPPL ini penting sebagai fungsi kendali pengelolaan lingkungan dan dampak sosial. Maka berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KSM/pelaksana kegiatan sebagai tindak lanjut dokumen SPPL adalah dimulai dari penerapan Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3), pemasangan spanduk/baliho sosialisasi K3 di beberapa lokasi strategis, seluruh pekerja dilindungi melalui asuransi dengan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maupun Jaminan Kematian (JKK) selama berkerja, seluruh pekerja dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD), memasang rambu peringatan di lokasi pekerjaan, segera melakukan pengangkutan bekas galian dan bongkaran, melakukan penyiraman di lokasi pekerjaan untuk mengurangi pencemaran udara akibat debu, memastikan penggalian dan penimbunan pipa untuk limbah sesuai standar minimal, mengatur penggunaan mesin yang menyebabkan bising dan upaya lainnya sesuai dengan upaya pengelolan dan upaya pemantauan dampak dalam dokumen SPPL. Disamping itu, karena masih dalam masa pandemi Covid-19, maka dalam ketentuan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19, sehingga setiap pekerja diwajibkan menggunakan masker, pengukuran suhu badan pekerja dengan thermogun, menyediakan hand sanitizer, tempat cuci menggunakan sabun, memasang spanduk upaya pencegahan penularan Covid-19 dan menerapkan prokes 5M di lokasi pekerjaan.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Pengamanan Dampak Dalam Pelaksanaan Kegiatan Adalah Suatu Keniscayaan

Namun pertanyaan besarnya apakah semua upaya ini telah berjalan baik di lokasi CFW dan DFAT di Kota Mataram? Siapakah yang sesungguhnya bertanggung jawab untuk menjalankan dan memastikannya? Dari peninjauan di lokasi kegiatan yang dilakukan oleh Askot Safeguard Tim Kotaku Mataram, untuk awal dimulainya pekerjaan kepatuhan untuk menjalankan K3, prokes 5M dan tindak lanjut pengamanan dampak sudah cukup baik, walaupun di beberapa titik lokasi masih perlu diberikan sosialisasi dan penyadaran penuh kepada pelaku kegiatan di tingkat BKM, KSM maupun pekerja untuk bisa tetap mematuhi arahan dan anjuran yang diberikan oleh pendamping di lapangan maupun Askot Safeguard. Kendornya fungsi kendali untuk menjalankan K3, prokes 5M dan tindak lanjut pengamanan dampak di lapangan dapat menyebabkan KSM dan/atau pekerja tidak mematuhi ketentuan dan arahan yang diberikan. Upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja harus dengan menjamin seluruh pekerja menggunakan APD dan melaksanakan langkah langkah yang diperlukan dalam K3, termasuk memastikan penerapan prokes 5M yang tentunya menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari KSM sebagai pelaksana kegiatan, BKM yang mengawasi, fasilitator pendamping dan Askot Safeguard yang memiliki tugas dan fungsi utama untuk memastikan dan terlaksananya hal tersebut. Dengan adanya kesadaran bersama akan pentingnya menjalankan K3, prokes 5M dan tindak lanjut pengamanan dampak di lokasi pekerjaan, maka akan berdampak pada lancarnya proses pekerjaan, meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, mengurangi potensi penyebaran Covid-19, dan terbentuk upaya optimal dalam rangka pengamanan dampak lingkungan maupun dampak sosial yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pekerjaan. Semoga ini dapat menjadi perhatian kita bersama.

Sinergitas Program Yang Menjadi Misi Kunjungan Direktur PKP Ke Kota Mataram

Sinergitas program penanganan kumuh perkotaan di Kota Mataram khususnya Kawasan DAS Jangkok yang telah dimulai tahun lalu melalui kegiatan skala kawasan Program Kotaku mendapat perhatian dari Kepala BPIW dan Direktur PKP Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR yang hari ini Senin (27/09/2021) berkunjung ke lokasi Kawasan DAS Jangkok. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Kasubdit Wilayah/PMU Kotaku, Kepala BPPW NTB, Kepala Balai Perumahan NTB, Satker IBM, Team Leader OSP-05 NTB, Korkot Kotaku Mataram dan jajaran. Penataan kawasan sempadan sungai Jangkok telah termuat dalam Memorandum Program (MP) yang menjadi prioritas penanganan melalui kegiatan skala kawasan. Prioritas penataan permukiman di sekitar kawasan DAS Jangkok sisi utara telah merubah wajah sempadan sungai dengan tersedianya jalan inspeksi, infrastruktur dasar berupa jalan pedestrian dan drainase, pengelolaan limbah, jembatan penghubung dan ruang terbuka publik. Penataan jalan lingkungan permukiman melalui dana Aspirasi Dewan dan perbaikan rumah tidak layak huni di seputar kawasan DAS Jangkok melalui program BSPS Balai Perumahan Provinsi NTB adalah bentuk kolaborasi program yang yang menyeluruh. Artinya tidak hanya infrastruktur dasar yang dilakukan penataan, namun rumah tempat bermukim warga (terutama rumah tidak layak huni yang belum pernah mendaptkan bantuan perbaikan) juga menjadi sasaran dalam rangka penanganan kumuh perkotaan. Setelah melihat dari dekat penataan kawasan DAS Jangkok dan mengunjungi lokasi perbaikan rumah yang diintervensi melalui program BSPS Balai Perumahan, Rachman Arief beserta rombongan juga mengidentifikasi calon usulan perbaikan rumah yang diusulkan untuk program BSPS melalui anggran tahun 2022 yang lokasinya beririsan dengan kegiatan skala kawasan Kotaku, kegiatan skala lingkungan melalui Kotaku-DFAT maupun perbaikan rumah melalui program BSPS Balai Perumahan yang berada di Kelurahan Kebon Sari maupun Kelurahan Pejeruk. Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana turut menyambut kunjungan yang dipimpin oleh Rachman Arief yang merupakan Kepala BPIW beserta rombongan di areal Taman Bawaq Kokoq (Tabako) di wilayah Sukaraja Kelurahan Ampenan Tengah. Turut mendampingi Walikota, Asisten I, Asisten II, Kepala Dinas Perkim, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Camat Ampenan, Lurah maupun Kepala Lingkungan, dan dari unsur SKPD. Diskusi ringan membahas penataan kawasan DAS Jangkok dijadikan kesempatan oleh Walikota Mohan untuk menyampaikan usulan penataan sisi selatan sungai Jangkok agar penataannya menjadi tuntas. Kepala BPIW Rachman Arief menekankan kolaborasi penganggaran untuk menuntaskan permasalahan kumuh di Kawasan DAS Jangkok, karena selama pandemi terjadi pengurangan anggaran untuk infrastruktur permukiman. Walikota Mataram berkomitmen untuk menyiapkan lahan dan penyiapan masyarakat di lokasi penataan, sehingga diharapkan tahun 2022 telah dinyatakan siap untuk diintervensi melalui kegiatan Kotaku skala kawasan

Dalam kesempatan ini juga, Rachman Arief beserta rombongan menyempatkan diri untuk mengunjungi lokasi skala kawasan pasca bencana yang rencana intervensinya dilaksanakan tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022. Kegiatan skala kawasan pasca bencana yang berada di Kelurahan Bertais yang juga merupakan lokasi skala lingkungan DFAT, termasuk kolaborasi program Sanitasi Desa (Sandes) dari bidang sanitasi BPPW NTB maupun perbaikan rumah tidak layak huni melalui program BSPS Balai Perumahan NTB. Terlaksananya kegiatan skala kawasan pasca bencana tentunya tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kota Mataram dalam upaya penyiapan lahan dan dukungan program penataan lingkungan baik di Lingkungan Pengempel Indah dan Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais, maupun Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas. Selanjutnya rombongan meninjau lokasi pembangunan rumah susun bagi nelayan yang berada di Kelurahan Bintaro Ampenan, karena Kawasan Permukiman Bintaro juga menjadi ikon baru pola penataan permukiman yang berada di sempadan pantai. Dukungan program rumah susun dari Balai Perumahan NTB menjadi perhatian Pemerintah Kota Mataram untuk menyediakan permukiman yang layak di kawasan kumuh nelayan dan kepastian bermukim bagi warga miskin nelayan di Kelurahan Bintaro.